

FUNGSI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH DI SD NEGERI 19 BANDA ACEH

Sulaiman, Nurmasiyah, Mislinawati

Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah, Banda Aceh
Email: soelaiman@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

This research raises the problem of how the school Committee functions in the Development and implementation of school programs at SD Negeri 19 Banda Aceh. This research aims to describe the function of the school committee in the Development and implementation of school programs in SD Negeri 19 Banda Aceh. The subject of this study is a school committee administrator who is directly involved in management. The number of research subjects is as many as 22 people. The method used is an analytical description method with a qualitative approach. Data collection is done by non-test techniques in the form of poll and data processing in the form of percentage calculations. The research results that the school Committee plays a role in determining school policies. The role of the school Committee is limited to receiving reports from the school principal. The school committee was poorly involved in taking the school's policies. The school committee is only involved when raising funds from the community. The conclusion of the research is the function of the school committee in the Development and implementation of the school program at SD Negeri 19 Banda Aceh is still small. The involvement of school committees in the development and implementation of school programs in SD Negeri 19 Banda Aceh is only 36.37%. The school committee will be fully functional involved by the school if it has to do with the school's luminescence that requires community assistance.

Keywords: school committees, development, implementation, school programs

Pendahuluan

Kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat, terutama masyarakat di sekitar sekolah. Sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Itu pula sebabnya mengapa masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga pendidikan diharapkan dapat bekerja sama secara erat dengan masyarakat.

Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS) dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan

pendidikan di sekolah. Menurut Hendarmoko dan Samsuddin (2008:32) menyatakan pembentukan komite sekolah bertujuan:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program ditingkat pendidikan.
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. menciptakan kondisi transparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan pendapat jelaslah bahwa kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula.

Paradigma lama, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah. Pihak keluarga dan masyarakat dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para guru. Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan. Keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan oleh guru di sekolah. Orangtua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh guru-guru mereka.

Berkaitan dengan komite sekolah, Rahadi (2006:15) menjelaskan bahwa: Dalam paradigma transisional, hubungan keluarga dan sekolah sudah mulai terjalin, tetapi masyarakat belum melakukan kontak dengan sekolah. Dalam paradigma baru (*new paradigm*) hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, termasuk untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa di sekolah.

Sekolah adalah sebuah pranata sosial yang bersistem, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Komponen utama sekolah

adalah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum, serta fasilitas pendidikan. Selain itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini orang tua dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan sekolah.

Harapannya kehadiran komite sekolah dapat membantu pihak sekolah dan orang tua dalam menjembatani hubungan sekolah. Realitanya komite sekolah belum mampu menjadi penghubung antara sekolah dengan pihak masyarakat. Buktinya kehadiran komite sekolah seperti tidak mempunyai makna yang berarti bagi hubungan sekolah dengan masyarakat. Bahkan sepertinya fungsi komite sekolah tidak berfungsi seperti harapan.

Fenomena-fenomena yang muncul antara lain komite yang terbentuk tidak berfungsi (hanya papan nama) atau kehadiran komite sekolah hanya bersifat formalitas semata, komite sekolah seolah-olah berfungsi sebagai stempel kebijakan-kebijakan kepala sekolah, terjadinya persekongkolan antara kepala sekolah dan komite sekolah, ada anggapan komite sekolah memiliki peran seperti mengumpulkan dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka, ada anggapan lain bahwa komite sekolah dianggap sebagai masalah baru oleh orang tua murid karena menjadi aktor utama di balik mahalnnya biaya sekolah. Setelah melihat fenomena-fenomena ini muncul pertanyaan “mengapa komite sekolah tidak/belum berfungsi secara optimal. Komite sekolah hanya berfungsi pada saat-saat tahun ajaran baru. Sedangkan dalam pengembangan sekolah sepertinya kurang dilibatkan. Ini menunjukkan bahwa fungsi komite sekolah belum berfungsi seperti harapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengapa hal ini dapat terjadi, tentu saja banyak persoalan-persoalan yang harus dibenahi dalam kegiatan komite sekolah. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah struktur komite sekolah harus tahu fungsinya dalam pengembangan sekolah, bukan hanya pada tahun ajaran baru baru berfungsi.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui informasi yang didapat dari subjek akan terjawab permasalahan yang sedang diteliti atau ingin dijawab. Subjek penelitian merupakan orang-orang yang dikenai dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus komite sekolah. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 22 orang. Pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian ini. Jadi tidak semua pengurus komite sekolah dilibatkan dalam penelitian ini.

Subjek penelitian yang dipilih memang benar-benar orang-orang yang terlibat secara langsung dalam organisasi komite sekolah.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data. Data yang diperoleh akan menjadi informasi yang dapat diolah untuk menarik sebuah kesimpulan penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Penjelasan dari teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan angket dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik persentase. Berdasarkan Sugiono (2010:43), perhitungan persentase dapat digunakan persamaan:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan simbol : P = Persentase siswa yang nilai sumatif

F = Frekwensi siswa yang nilai sumatif

N = Jumlah total subjek

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dalam pengembangan program sekolah, fungsi komite sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari jawaban responden dari angket penelitian yang disebarkan. Pada perumusan, penetapan, sosialisasi visi dan misi sekolah, keterlibatan komite hanya 36,37%. Fungsi komite sekolah dalam merumuskan, menetapkan, mensosialisasikan tujuan sekolah hanya 36,37%. Fungsi komite dalam menetapkan rencana kerja sekolah juga masih kecil, komite sekolah hanya 36,37%. Ini menunjukkan bahwa fungsi komite yang ditetapkan oleh Depdiknas (2006:5) yang menyatakan komite sekolah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan”.

Di dalam menyusun rencana anggaran sekolah keterlibatan komite sekolah juga masih kurang, di mana fungsi keterlibatan komite sekolah hanya 36,37%. Keterlibatan komite sekolah dalam manajemen organisasi sekolah juga kurang dilibatkan, di mana keterlibatan komite sekolah hanya 13,63%. Keterlibatan komite sekolah penentuan peraturan sekolah, tata tertib sekolah, dan pengembangan budaya sekolah masih kurang. Di mana keterlibatan komite sekolah hanya 36,37%. Keterlibatan dalam pengawasan program sekolah 36,37%. Keterlibatan terhadap arah kebijakan sekolah 13,63%. Keterlibatan penyelenggaraan

keuangan sekolah 13,63%. Keterlibatan dalam penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja dan pengawasan program kerja hanya 36,37%. Keterlibatan terhadap pengembangan sekolah dan pengadaan sarana belajar hanya 13,63%. Keterlibatan dalam pengembangan budaya sekolah untuk membentuk karakter siswa hanya 36,37%. Kenyataan ini tentu saja bertentangan dengan aturan. Menurut Depdiknas (2006:5) menyatakan komite memberikan masukan tentang rencana anggaran pendidikan, kriteria kerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan.

Fungsi komite yang paling dominan adalah dalam penghimpunan dana dari masyarakat untuk keperluan sekolah. Hal ini mencapai 100%. Ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa komite sekolah sebagai jembatan menyampaikan program-program sekolah kepada masyarakat khususnya sehubungan dengan pendanaan. Sementara keterlibatan dalam penggunaan dana sekolah, keterlibatan dari komite sekolah masih kurang yaitu 13,63%. Keterlibatan dalam menyusun pertanggung jawaban keuangan sekolah juga masih kecil yaitu 13,63%. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, bahwa komite sekolah hanya menerima laporan pertanggung jawaban dari pihak sekolah tanpa dilibatkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada komite untuk diteruskan kepada masyarakat. Sepertinya komite sekolah hanya difungsikan sebagai penyampai informasi dari sekolah kepada masyarakat tanpa diikutsertakan dalam kegiatan sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, jelas fungsi komite sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh masih belum baik. Di mana ada hal-hal yang memang komite sekolah terkadang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Sekolah akan melibatkan komite sekolah secara penuh jika ada kaitannya dengan pengumpulan dana dari pihak masyarakat. Sementara dalam implementasi penggunaan dana setelah dikumpulkan tidak banyak yang tahu komite sekolah. Dapat dikatakan bahwa komite sekolah hanya berperan melegalkan semua kegiatan yang dilakukan sekolah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa fungsi komite sekolah dalam pengembangan dan implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh masih kecil. Keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan dan Implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh hanya 36,37%.

Komite sekolah akan berfungsi penuh dilibatkan oleh pihak sekolah jika ada kaitannya dengan pendanaan sekolah yang memerlukan bantuan dari masyarakat. Dalam hal ini komite

sekolah berada paling depan dalam menjelaskan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pengelolaan sekolah, pengelolaan keuangan, penentuan kebijakan sekolah, sepertinya pihak komite sekolah kurang dilibatkan.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara.
- Depdiknas. 2005. *Komite Sekolah dan Pengembangan Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Pasal 1 ayat (2) tentang Fungsi Komite Sekolah.
- Hendarmoko dan Samsuddin. 2008. *Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah* Jurnal Lingkaran Mutu Vol. 1 Desember 2008.
- Rahadi, Arief. 2006. *Peran Komite Sekolah Dalam Pengembangan Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.